



පිම්බුරු ප්‍රාදේශීය සර්කාර
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමස්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන කොට්ඨාසය
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සිවිල් සේවය සහ පදිංචි කළමනාකරණය
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රාජ්‍ය මාර්ග, පන්දායන් මාර්ග, පන්දායන් (පන්දායන්) මාර්ග, පන්දායන් (පන්දායන්) මාර්ග
JALAN D.I. PANDAJITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Tim Kerja	: Umum dan Kepegawaian
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	: 82,85 Nilai
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	: Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum
Target Hasil Kegiatan	: 12 bulan
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target Output Sub Kegiatan	: 3 Paket

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melaksanakan persembahyangan dan mengatur sesajen sehari-hari sesuai dengan keyakinan demi keselamatan kerja bersama serta sering melaksanakan sembahyang bersama terutama setiap Purnama/Tilem dengan menghaturkan sesajen. Disamping itu setiap tahun juga dilaksanakan Piodalan di Pemerajan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Bali untuk memohon keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas.

2. Penerima Manfaat

Pertama-tama dan secara langsung menerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah semua Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia banten sekaligus *pemangku* (swakelola).

b. Tahapan dan Waktu pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

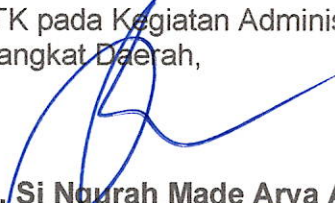
Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 75.738.750,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bali, 2 Januari 2025

PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah,



Drs. Si Nourah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003

R A B
RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2025
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

NO	URAIAN	PAGU
1	2	3
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	
-	UPACARA KEAGAMAAN BESAR	35,000,000
-	UPACARA KEAGAMAAN SEDANG	23,738,750
-	UPACARA KEAGAMAAN KECIL	17,000,000
TOTAL		75,738,750

PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah


Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003